
TATA KELOLA PEDAGANG KAKI LIMA DI KOTA MAKASSAR (Studi Kasus Pedagang Pisang Epe' di Pantai Losari)

Muhammad Yunus¹, Auliya Insani²

¹Departemen Ilmu Administrasi Universitas Hasanuddin.

myunus59@yahoo.com

²Sarjana Departemen Ilmu Sosiologi, Universitas Hasanuddin

Abstract

This study examines street vendor management in Makassar, particularly pisang epe' (pressed banana) traders. This study indicates most pisang epe traders are Makassarnese and have lower level of educational background. This condition make them should work in informal sectors. Although most of pisang epe traders are migrants but they can easily access public services, education and health sectors, in Makassar. City Government of Makassar has been had a specific policy regarding street vendor since 1990. This study indicates that street vendor management in Makassar is well implemented. However, this study suggests a responsive policy to provide more appropriate market place to pisang epe traders that can support their business since they are a key actor in indigenous cullinair that can contribute into tourism business.

Key words: *responsive policy, tourism business, Makassar*

Abstrak

Penelitian ini mengkaji tata kelola pedagang kaki lima di Makassar, studi kasus pedagang pisang epe' di Pantai Losari, Makassar. Pedagang pisang epe' di dominasi oleh suku Makassar dengan tingkat pendidikan rata-rata tamat SMP dan SD. Kondisi ini memaksa mereka untuk bekerja di sektor informal, yaitu sebagai pedagang pisang epe. Sebagian besar pedagang pisang epe' adalah penduduk migran namun mereka bisa mengakses pelayanan publik, pendidikan dan kesehatan, dengan baik. Pemerintah Kota Makassar memiliki kebijakan terkait pengelolaan pedagang kaki lima sejak 1990. Penelitian ini mengindikasikan tata kelola pedagang kaki lima di Makassar cukup baik. Meskipun demikian, penelitian ini merekomendasikan kebijakan pemerintah yang lebih responsif kepada penjual pisang epe' dengan menyediakan tempat menjual yang baik dan tidak harus mengganggu ketertiban kota. Keberadaan mereka sangat membantu mengembangkan bisnis kuliner tradisional yang dapat berkontribusi pada bisnis wisata.

Kata kunci: *Kebijakan responsif, bisnis wisata, Makassar*

PENDAHULUAN

Daerah perkotaan merupakan wadah konsentrasi permukiman penduduk dari berbagai kegiatan ekonomi dan sosial dan mempunyai peran yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat. Di satu sisi kegiatan ekonomi dan sosial penduduk yang dibarengi dengan kebutuhan yang tinggi semakin memerlukan ruang untuk meningkatkan kegiatan penduduk sehingga menyebabkan semakin bertambahnya ruang untuk mendukung kegiatan sektor informal.

Menurut Jayadinata (1999 : 146), Karakteristik sektor informal yaitu bentuknya tidak terorganisir, kebanyakan usaha sendiri, cara kerja tidak teratur, biaya dari diri sendiri atau sumber tak resmi, dapatlah diketahui betapa banyaknya jumlah anggota masyarakat memilih tipe usaha ini, karena mudah dijadikan sebagai lapangan kerja bagi masyarakat strata ekonomi rendah yang banyak terdapat di negara kita terutama pada kota besar maupun kecil.

Sejak terjadinya krisis ekonomi di Indonesia pada tahun 1998 banyak sekali kegiatan ekonomi yang cenderung beralih pada sektor informal. Kegiatan ekonomi sektor informal salah satunya pedagang kaki lima. Bisa dilihat hampir semua kota-kota besar di Indonesia berkembang sangat pesat. Terlebih selama krisis moneter menyebabkan banyak industri gulung tikar, sehingga banyak terjadi pemutusan hubungan kerja. Hal ini pada gilirannya menambah pengangguran baru, yang nantinya muncul fenomena-fenomena baru pedagang kaki lima sebagai jalan keluarnya dari pengangguran.

Kemampuan sektor informal dalam menampung tenaga kerja didukung oleh faktor-faktor yang ada. Faktor utama adalah sifat dari sektor ini yang tidak memerlukan persyaratan dan tingkat keterampilan, sektor modal kerja, pendidikan ataupun sarana yang dipergunakan semuanya serba sederhana dan mudah dijangkau oleh semua anggota masyarakat atau mereka yang belum memiliki pekerjaan dapat terlibat didalamnya. Salah satu sektor yang kini menjadi perhatian pemerintah Sulawesi Selatan adalah sektor tenaga kerja yang sifatnya informal. Sektor kerja informal ini beroperasi pada tempat-tempat tertentu di setiap pusat keramaian kota Makassar.

Ada beberapa komunitas pedagang kaki lima di kota Makassar, salah satunya adalah komunitas pedagang kaki lima Pantai Losari. Sesuai dengan namanya komunitas ini beraktifitas di sepanjang kawasan Pantai Losari, tepatnya di kelurahan Bulogading, Maloku, dan Losari kecamatan Ujung Pandang kota Makassar. Komunitas pedagang kaki lima ini sudah berjualan di kawasan Pantai Losari sejak beberapa puluh tahun yang lalu dan jumlah mereka terus bertambah setiap tahunnya, mereka menempati emperan-emperan toko di sepanjang Pantai Losari, jenis dagangannya bermacam-macam. Di satu sisi keberadaan pedagang kaki lima cukup membantu mengatasi masalah pengangguran di kota Makassar dan sebagai salah satu sumber pemasukan PAD bagi pemerintah kota Makassar, tetapi di sisi lain keberadaan pedagang kaki lima tersebut menimbulkan sejumlah permasalahan.

Pedagang kaki lima selalu memanfaatkan tempat-tempat yang senantiasa dipandang sebagai profit misalkan pusat kota, tempat keramaian hingga tempat-tempat yang dinilai berpotensi untuk menjadi objek wisata. Mereka hanya berfikir bahwa apa yang mereka lakukan adalah untuk mencari nafkah tanpa memperdulikan hal-hal yang lain.

Di satu sisi keberadaan pedagang kaki lima diakui sebagai potensi ekonomi yang tidak bisa dipandang sebelah mata. Pedagang kaki lima yang mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah yang cukup besar serta menyediakan kebutuhan hidup bagi masyarakat. Tetapi lain pihak keberadaan pedagang kaki lima dianggap mengganggu keindahan dan ketertiban lingkungan Kota. Inilah yang membuat pemerintah turun tangan dalam permasalahan ini. Campur tangan pemerintah dalam hal ini mempengaruhi pola kehidupan pedagang kaki lima.

KAJIAN LITERATUR

Konsep Kebijakan

Menurut Thomas R. Dye dalam Solichin Abdul Wahab (1997) kebijaksanaan publik diartikan bila pemerintah memilih melakukan sesuatu masalah maka harus ada tujuan (obyektifnya) dan kebijaksanaan negara itu meliputi "tindakan" pemerintah, jadi bukan semata-mata pernyataan keinginan pemerintah atau pejabat pemerintah saja. Di samping itu sesuatu yang tidak dilaksanakan oleh pemerintah termasuk kebijaksanaan negara hal ini disebabkan karena : "Sesuatu yang tidak dilaksanakan" oleh pemerintah akan mempunyai dampak pengaruh yang sama dengan "sesuatu yang dilakukan" oleh pemerintah.

Mengacu pada pandangan tersebut, maka kebijaksanaan negara dalam konteks ini adalah tindakan atau keputusan yang dilakukan atau tidak ingin dilakukan oleh pemerintah untuk mengatasi permasalahan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan dengan menggunakan sarana-sarana yang ada guna kepentingan seluruh masyarakat.

Menurut Khairuddin dalam Solichin Abdul Wahab (1997), pembangunan perkotaan sangat memperhatikan faktor-faktor seperti berikut : 1) Fungsi dan peranan kota, 2) Faktor geografis (termasuk topografi), 3) Faktor demografis, 4) Faktor sosial budaya, 5) Faktor sikap mental, 6) Faktor ekonomi, 7) Faktor politik, 8) Faktor-faktor lain yang mendukung dan menjadi dasar pembangunan kota tersebut.

Konsep Sektor Informal

Konsep sektor informal pertama kali di pergunakan oleh Keirt Hard dari University of Manchester pada tahun 1973 yang menggambarkan bahwa sektor informal adalah bagian angkatan kerja di kota yang berada di luar pasar tenaga kerja yang terorganisir. Kemudian konsep informal di kembangkan oleh ILO dalam berbagai penelitian di Dunia Ketiga. Lebih lanjut oleh Hart mengungkapkan bahwa konsep serkto informal itu digunakan sebagai salah satu alternatif dalam menangani masalah kemiskinan di Dunia Ketiga dalam hubungannya dengan pengangguran, migrasi dan urbanisasi. Sejak Hart memperkenalkan konsep sektor informal, konsep itu sering digunakan untuk menjelaskan bahwa sektor informal dapat mengurangi pengangguran di kota Negara sedang berkembang. Bahkan beberapa pengamat pembangunan di Negara sedang berkembang memandang sektor informal sebagai strategi alternatif pemecahan masalah keterbatasan peluang kerja. Sektor informal berfungsi sebagai "katup pengaman" yang dapat meredam ledakan sosial akibat meningkatnya pencari kerja, baik dalam kota maupun pendatang dari desa. (Chris dan Effendi, 1991).

Terwujudnya kehidupan sosial ekonomi seseorang tidak terlepas dari usaha-usaha manusia itu sendiri dengan segala daya dan upaya yang ada serta dipengaruhi oleh beberapa faktor pendorong antara lain dorongan untuk mempertahankan diri dalam hidupnya dari berbagai pengaruh akan dorongan untuk mengembangkan diri dari kelompok. Semuanya terlihat dalam bentuk hasrat, kehendak, kemauan, baik secara pribadi maupun yang sifatnya kelompok sosial.

Kehidupan sosial ekonomi dalam pengertian umum menyangkut beberapa aspek yaitu pendidikan, kepercayaan, status perkawinan, keadaan perumahan,

kesehatan, status pekerjaan dan penghasilan. Sedangkan Melly G. Tang (Koentjaraningrat, 1981) mengemukakan bahwa kehidupan sosial ekonomi dalam ilmu kemasyarakatan sudah lazim mencakup tiga unsur, yaitu pekerjaan, pendidikan, dan kesehatan.

Pendapat dari Soeratmo (Dahriani, 1995) mengemukakan bahwa aspek kehidupan sosial ekonomi meliputi antara lain:

1. Aspek sosial demografi meliputi antara lain: pembaharuan sosial, tingkah laku, motivasi masyarakat, serta kependudukan dan migrasi.
2. Aspek ekonomi meliputi antara lain: kesempatan kerja, tingkat pendapatan dan pemilikan barang.
3. Aspek pelayanan sosial meliputi antara lain: sarana pendidikan, sarana kesehatan, sarana olahraga dan sarana transportasi.

Unsur kehidupan sosial yang dikemukakan oleh Koelle (Bintarto, 1989), yaitu aspek kesejahteraan sosial. Dimana ukuran-ukuran yang dinyatakan bahwa adanya kesejahteraan sosial adalah sebagai berikut:

1. Dengan melihat kualitas hidup dari segi materi seperti: keadaan rumah, bahan rumah tangga, bahan pangan, dan sebagainya.
2. Dengan melihat kualitas hidup dari segi fisik seperti: kesehatan tubuh, lingkungan alam, dan sebagainya.
3. Dengan melihat kualitas hidup dari segi spiritual seperti: moral, etika, keserasian, penyesuaian, dan sebagainya.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif. Metode pengumpulan data yang dilakukan adalah survei dengan unit analisis adalah rumah tangga. Metode pemilihan sampel yang digunakan adalah purposive atau berdasarkan alasan tertentu yaitu para pedagang pisang epe'. Penelitian ini telah mewawancarai 30 orang menjadi sampel dalam studi ini. Semua responden ini dipilih karena berprofesi sebagai penjual pisang epe' yang menjadi fokus dari studi ini. Metode pengumpulan data lain yang digunakan adalah observasi lapangan dengan mengamati langsung kondisi para penjual pisang epe' dan keluarganya. Selain itu, observasi ini juga melihat proses pengelolaan pedagang kaki lima di Pantai Losati.

Lokasi penelitian difokuskan di daerah wisata Pantai Losari dimana semua penjual pisang epe' berkumpul. Penjual pisang epe' di Pantai Losari ini telah sejak lama melakukan aktivitas di daerah ini yang menjadikan lokasi ini destinasi utama wisatawan yang ingin menikmati pisang epe' sebagai kuliner lokal Makassar.

Metode analisis data yang digunakan dalam studi ini adalah analisis statistik deskriptif dengan menggunakan tabulasi silang sederhana berdasarkan hasil data survei yang telah dikumpulkan.

HASIL PENELITIAN

A. Kebijakan Pembinaan Pedagang kaki Lima Kota Makassar

Berbagai upaya yang telah dilakukan pemerintah kota sampai di tingkat kecamatan dan kelurahan serta instansi terkait lainnya secara fungsional memiliki tugas pembinaan yang berupaya untuk mengimplementasikan kebijakan-kebijakan pemerintah berkenaan dengan pembinaan pedagang kaki lima termasuk pedagang

pisang epe. Dalam konteks pembahasan hasil penelitian ini, implementasi kebijakan pembinaan pedagang kaki lima dalam hal ini pedagang pisang epe yang meliputi aspek pelaksanaan kebijakan pemberian penyuluhan dan pembimbingan, penataan tempat dan waktu berusaha serta kebijakan penataan perizinan yang ditujukan kepada pedagang kaki lima di wilayah Kota Makassar, seperti dengan diterbitkannya Perda No. 2 Tahun 1990 Tentang Pembinaan Pedagang Kaki Lima Dalam Kota Madya Ujung Pandang. Selanjutnya diikuti diterbitkannya Surat Keputusan Walikota Makassar Nomor 01 Tahun 2002 yang memberikan kewenangan kepada Camat untuk melakukan penertiban dan pembinaan pedagang kaki lima di wilayah kerjanya masing-masing yang dikoordinasikan dengan Instansi terkait lainnya. Seperti pelaksanaan penyuluhan tentang kewenangan pemerintah kota Makassar dalam melakukan pembinaan dan penataan pedagang kaki lima yang dikoordinasikan dan difasilitasi oleh Dinas Informasi dan Komunikasi Kota Makassar.

B. Keadaan Sosial Ekonomi

Dalam pembahasan berikut ini, penulis mencoba memberikan gambaran tentang keadaan sosial ekonomi pedagang pisang epe.

1. Pendapatan Sebagai Pedagang Pisang Epe

Berbagai jenis aktivitas manusia tentunya mengharapkan imbalan, apalagi yang bernilai ekonomi tentunya. Imbalan yang dimaksud adalah pendapatan yang diperoleh pedagang kaki lima dalam bentuk uang. Untuk lebih jelasnya, dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 1

Distribusi Responden Berdasarkan Jumlah Pendapatan

No	Pendapatan	Frekuensi	Persentase (%)
1	Dibawah 50.000	1	3,3
2	50.000 – 100.000	13	43,3
3	100.000 – 200.000	11	36,7
4	Diatas 200.000	5	16,7
Jumlah		30	100

Sumber: Hasil Tabulasi Data Primer 2015

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa 43,3% berpenghasilan antara 50.000 – 100.000 (13 responden) dan 36,7% berpenghasilan 100.000 – 200.000 (11 responden). Ini menunjukkan bahwa pendapatan para pedagang kaki lima sangat bervariasi serta pluktuatif.

2. Pekerjaan Sampingan

Persaingan hidup di kota sangat tinggi, sehingga banyak yang berusaha untuk mencari pekerjaan tambahan untuk mencukupi kebutuhan hidupnya.

Tabel 2

Distribusi Responden Yang Mempunyai Pekerjaan Sampingan Di Kota Makassar Selain Sebagai Pedagang Pisang Epe

No	Mempunyai Pekerjaan Sampingan	Frekuensi	Persentase (%)
1	Ada	19	63,3
2	Tidak Ada	11	36,7
Jumlah		30	100

Sumber: Hasil Tabulasi Data Primer 2015

Tabel di atas menunjukkan bahwa 63,3% atau 19 responden mempunyai pekerjaan sampingan selain menjadi pedagang pisang epe, dan 36,7% atau 11 responden tidak mempunyai pekerjaan sampingan selain sebagai pedagang pisang epe. Dari data yang diperoleh, pekerjaan sampingan selain menjual pisang epe yaitu dagang, buruh pabrik/pasar, pegawai/karyawan, dan ada pula yang bekerja sebagai buruh cuci.

3. Keadaan Tempat Tinggal

Tempat tinggal adalah tempat berlindung dari pengaruh cuaca di luar maupun sebagai tempat berkumpulnya manusia atau keluarga dalam kehidupan sehari-hari, sehingga tempat tinggal merupakan salah satu kebutuhan pokok bagi kehidupan manusia.

Di kota Makassar penyebaran pendatang tidaklah merata. Ada lingkungan merupakan pusat-pusat pendatang dari daerah tertentu, dan ada pula lingkungan yang sama sekali tidak di diami oleh para pendatang atau etnik. Sementara itu para penjual pisang epe menurut tempat tinggalnya dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3

Distribusi Responden Menurut Tempat Tinggal di Kota Makassar

No	Tempat Tinggal	Frekuensi	Persentase (%)
1	Dengan sanak saudara	7	23,3
2	Dengan istri/suami dan anak	22	73,3
3	Dengan teman	1	3,4
Jumlah`		30	100

Sumber: Hasil Tabulasi Data Primer 2015

Dari data di atas menunjukkan bahwa 73,3% responden tinggal atau bermukim bersama istri/suami dan anaknya, karena seperti yang telah dijelaskan pada tabel 20 bahwa sebagian besar dari mereka telah menetap bersama keluarga di kota Makassar. Sedangkan, 23,3% responden tinggal bersama sanak saudara, karena

para responden bermigrasi ke kota Makassar ada sebagian yang diajak oleh sanak saudara mereka dan 3,4% atau 1 responden tinggal bersama teman.

Sementara itu status kepemilikan rumah tempat tinggal responden di kota Makassar dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4
Distribusi Status Kepemilikan Rumah Responden Di Kota Makassar

No	Status Tempat Tinggal	Frekuensi	Persentase (%)
1	Kontrak	8	26,7
2	Milik sendiri	16	53,3
3	Menumpang dengan keluarga	6	20
Jumlah		30	100

Sumber: Hasil Tabulasi Data Primer 2015

Data di atas menunjukkan bahwa status kepemilikan tempat tinggal responden di kota Makassar, yaitu 53,3% status kepemilikan rumah adalah milik sendiri, 26,7% adalah kontrakan, dan 20% menumpang dengan keluarga.

Seperti hasil penelitian yang di lakukan di kota Makassar, menemukan bahwa 44,5% dari pekerja sektor informal perkotaan menempati rumahnya sendiri. Sedangkan selebihnya menempati tempat tinggal yang bukan miliknya. Mereka yang menempati tempat tinggal yang bukan miliknya ini 26,1% merupakan kontrakan, 11,6% menunggui rumah dan lainnya 7,8% (Manggunrai, 1987).

Berdasarkan tabel di atas dapat digambarkan bahwa responden telah memiliki kemampuan yang cukup dalam hal kepemilikan tempat tinggal. Namun untuk lebih lengkapnya dari status kepemilikan rumah tersebut perlu dijelaskan pula bagaimana jenis rumah yang mereka tinggali tersebut, apakah rumah kayu, rumah permanen dari batu, setengah batu atau hanya berupa kios saja. Untuk lebih jelasnya jenis rumah penjual pisang epe dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 5
Distribusi Jenis Bangunan Rumah Responden di Kota Makassar

No	Jenis Bangunan Rumah	Frekuensi	Persentase (%)
1	Rumah kayu	7	33,3
2	Rumah permanen dari batu	8	26,7
3	Setengah batu	14	46,7
4	Kios	1	3,3
Jumlah		30	100

Sumber: Hasil Tabulasi Data Primer 2015

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa rumah tinggal responden di kota Makassar, 33% responden mempunyai bentuk rumah kayu, rumah permanen dari batu sebanyak 26,7%, walaupun bentuk rumah mereka sangat sederhana tetapi dapat digolongkan rumah permanen. 46,7% yang mempunyai bentuk rumah setengah batu, sedangkan 1 responden yang hanya bertempat tinggal di kios-kios yang ada di Pantai Laguna.

4. Jumlah Anak

Jumlah anak dalam keluarga merupakan tanggungan bagi kepala keluarga untuk berusaha mencari penghasilan yang mencukupi untuk memenuhi kebutuhan para anggota keluarga (anak dan istri). Seorang anak laki-laki yang telah menikah tentunya mempunyai tanggung jawab terhadap keluarganya dan selalu berusaha memenuhi kebutuhan anak dan istrinya.

Tabel 6

Distribusi Responden Yang Telah Mempunyai Anak

No	Mempunyai Anak	Frekuensi	Persentase (%)
1	Ya	26	86,7
2	Tidak	3	10
3	Belum Kawin	1	3,3
Jumlah		30	100

Sumber: Hasil Tabulasi Data Primer 2015

Berdasarkan jumlah responden yang berstatus menikah sebanyak 29 responden atau dapat dikatakan hampir keseluruhan responden telah berstatus menikah. Dari tabel di atas menunjukkan bahwa jumlah responden yang telah memiliki anak yaitu 26 responden (86,7%), sedangkan responden yang berstatus menikah dan belum mempunyai anak sebanyak 3 responden (10%). Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar jumlah responden yang berstatus menikah mempunyai jumlah tanggungan dan berusaha mencari penghasilan untuk memenuhi kebutuhan anak dan istrinya dengan bekerja sebagai penjual pisang epe di kota Makassar.

Sementara itu, responden yang telah mempunyai anak dapat juga diketahui besarnya jumlah anak mereka pada tabel berikut ini:
mereka pada tabel berikut ini:

Tabel 7

Distribusi Responden Menurut Besarnya Jumlah Anak

No	Jumlah Anak	Frekuensi	Persentase (%)
1	5 orang anak lebih	2	6,7
2	4 orang anak	1	3,3
3	3 orang anak	4	13,3

4	2 orang anak	12	40
5	1 orang anak	7	23,4
6	Tidak mempunyai anak	3	10
7	Belum menikah	1	3,3
Jumlah		30	100

Sumber: Hasil Tabulasi Data Primer 2015

Tabel di atas menunjukkan besarnya jumlah anak dari 26 responden yang berstatus menikah dan telah mempunyai anak. Data di atas diurut berdasarkan urutan yang terbesar sampai terkecilnya jumlah anak. 6,7% mempunyai 5 orang anak atau lebih, 3,3% mempunyai 4 orang anak, 13,3% mempunyai 3 orang anak, 40% mempunyai 2 orang anak, dan 23,4% mempunyai 1 orang anak.

Besar kecilnya jumlah anak yang menjadi tanggungan bagi kepala keluarga terutama dalam memenuhi segala kebutuhan sang anak. Kebutuhan bagi anak selain sandang pangan juga kebutuhan untuk bersekolah adalah hal yang paling pokok bagi bekal masa depan anak.

Tabel 8

Distribusi Responden Menurut Anak Yang Bersekolah

No	Anak Yang Bersekolah	Frekuensi	Persentase (%)
1	Ada	18	60
2	Tidak ada	8	26,7
3	Tidak mempunyai anak	3	10
4	Belum menikah	1	3,3
Jumlah		30	100

Sumber: Hasil Tabulasi Data Primer 2015

Data di atas menunjukkan bahwa responden yang mempunyai anak yang bersekolah yaitu 18 responden (60%), ini merupakan salah satu usaha untuk meningkatkan status sosial khususnya bagi masa depan anak, sedangkan 8 responden (26,7%) tidak mempunyai anak yang bersekolah. Dari hasil data yang dimiliki, para responden yang tidak mempunyai anak yang bersekolah dikarenakan anaknya masih kecil atau belum cukup umur untuk berada pada usia sekolah.

5. Kesehatan

Aspek kesehatan merupakan salah satu sisi yang cukup penting dalam kehidupan setiap manusia. Hal ini karena selain kesehatan merupakan salah satu indikator dalam menentukan kesejahteraan masyarakat, tanpa kesehatan seperti halnya kehidupan manusia menjadi kurang berarti. Oleh karena itu masalah kesehatan ini tidak dapat diabaikan dalam kehidupan manusia. Begitu pula dengan halnya pedagang kaki lima, terutama bagi para penjual pisang epe masalah kesehatan sangat

dibutuhkan oleh karena kondisinya sebagai pedagang membutuhkan mereka harus tetap sehat karena harus melayani para pembeli.

Dari hasil data yang saya dapatkan bahwa rata-rata penjual pisang epe menggunakan puskesmas sebagai tempat pengobatan atau perawatan kesehatan. Hal ini menunjukkan bahwa penjual pisang epe mempunyai kesadaran yang tinggi akan pentingnya kesehatan bagi kelangsungan hidup.

6. Hubungan Sosial di Kota Makassar

Migrasi desa-kota yang dilakukan para pendatang yang bekerja sebagai penjual pisang epe tentunya secara penuh terlibat dalam kehidupan perkotaan. Mereka juga berintegrasi dan berinteraksi disamping dengan para penduduk kota, akan tetapi juga terutama pada teman-teman sesama penjual pisang epe dan terutama pada sanak saudara yang berada di kota.

Tabel 19

Distribusi Responden Menurut Kunjungan Pada Sanak Keluarga di Kota Makassar

No	Sering Berkunjung	Frekuensi	Persentase (%)
1	Ya	23	76,7
2	Tidak	7	23,3
Jumlah		30	100

Sumber: Hasil Tabulasi Data Primer 2015

Seperti yang terlihat pada tabel di atas, kunjungan pada tempat sanak keluarga menunjukkan 76,75 responden saling berkunjung ke tempat sanak keluarga di kota Makassar atau yang berada di kota Makassar sebagai kunjungan pada kerabat yang bermukim di kota. Sedangkan hanya 23,3% responden yang tidak pernah berkunjung pada sanak keluarga di kota Makassar, kurangnya kunjungan diantara mereka ini disebabkan oleh karena jarak tempat tinggal responden dan tempat tinggal sanak keluarga cukup jauh, sehingga kunjungan ke tempat sanak keluarga hampir tidak pernah.

Berikut ini tabel cara para responden mengadakan hubungan dengan orang-orang sesama daerah asal:

Tabel 10

Distribusi Responden Menurut Cara Mengadakan Hubungan Dengan Orang Sesama Daerah Asal di Kota Makassar

No	Cara Mengadakan Hubungan	Frekuensi	Persentase (%)
1	Saling berkunjung ke tempat masing-masing	13	43,3
2	Bertemu pada acara tertentu	10	33,3
3	Bertemu pada saat tidak bekerja	5	16,7

4	Hanya bertemu di daerah asal	2	6,7
Jumlah		30	100

Sumber: Hasil Tabulasi Data Primer 2015

Data di atas menunjukkan bahwa saling berkunjung ke tempat masing-masing yang biasa dilakukan oleh 13 responden (43,3%), 10 responden (33,3%) melakukan dengan bertemu pada acara-acara tertentu, misalnya pesta pernikahan dari seorang kerabat atau acara lainnya. Sedangkan yang bertemu pada pada asaat liburan atau saat tidak bekerja sehingga mempunyai waktu untuk bertemu dengan orang-orang sedaerah asal ada 5 responden (16,7%), dan yang jhanya bertemu di daerah asal saja sebanyak 2 responden (6,7%).

Selain itu juga dapat dilihat bahwa kecendrungan terjadinya konflik antara sesama pedagang kaki lima dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 11

Distribusi Responden Menurut Intensitas Terjadinya Konflik antar Sesama Penjual Pisang Epe di Pantai Losari

No	Terjadinya Konflik	Frekuensi	Persentase (%)
1	Sering	1	3,3
2	Jarang	3	10
3	Tidak pernah	26	86,7
Jumlah		30	100

Sumber: Hasil Tabulasi Data Primer 2015

Dari dabel diatas tergambar bahwa intensitas terjadinya konflik antar sesama penjual pisang epe hanya 3,3%, hal ini menggambarkan bahwa konflik antara penjual pisang epe sangat jarang terjadi. Kalaupun terjadi konflik diantara mereka hanya persoalan sepele atau hal-hal yang sifatnya dapat terselesaikan secara kekeluargaan.

Hubungan sosial baik antar teman seprofesi, sanak keluarga maupun tetangga di kota Makassar sangat penting peranannya bagi penyesuaian hidup di kota yang sangat berbeda dengan kehidupan di daerah asal. Dalam kehidupan sehari-hari, seseorang pasti memerlukan bantuan baik itu dari sanak keluarga, teman atau tetangga pada saat mereka sangat memerlukannya.

Tabel berikut ini cara responden mengatasi kesulitan ekonomi atau kesulitan lainnya:

Tabel 12

Distribusi Responden Menurut Cara Mengatasi Kesulitan Ekonomi atau Kesulitan Lainnya

No	Cara Mengatasi	Frekuensi	Persentase (%)
1	Meminta bantuan teman seprofesi	2	6,7

2	Meminta bantuan tetangga	4	13,3
3	Meminta bantuan pada sanak keluarga	24	80
Jumlah		30	100

Sumber: Hasil Tabulasi Data Primer 2015

Dari data di atas menunjukkan bahwa cara mengatasi bila responden mengalami kesulitan ekonomi atau kesulitan lainnya yang memerlukan bantuan, 24 responden (80%) mengatasi dengan meminta bantuan pada sanak keluarga, 4 responden (13,3%) mengatasi dengan meminta bantuan pada tetangga, dan 2 responden (6,7%) mengatasi dengan meminta bantuan pada teman seprofesi atau teman-teman sesama pedagang pisang epe.

Data tersebut menunjukkan kenyataan bahwa besarnya peranan sanak keluarga, tetangga, dan teman seprofesi dalam menjalin hubungan sosial kehidupan di perkotaan.

Sementara itu, hubungan antara masyarakat lainnya di sekitar pemukiman memerlukan proses interaksi dan adaptasi antar para penduduk dalam satu lingkungan tempat bermukim.

Tabel 13

Distribusi Responden Menurut Keterlibatan Dalam Kegiatan Kemasyarakatan di Lingkungan Tempat Tinggal

No	Sering Terlibat	Frekuensi	Persentase (%)
1	Ya	5	16,7
2	Kadang-kadang	18	60
3	Tidak	7	23,3
Jumlah		30	100

Sumber: hasil Tabulasi Data Primer 2015

Dari tabel di atas menunjukkan keterlibatan responden dalam kegiatan kemasyarakatan di lingkungan tempat tinggal mereka, misalnya kegiatan gotong royong atau kegiatan kemasyarakatan yang lainnya. Responden yang menjawab sering terlibat dalam kegiatan kemasyarakatan yaitu ada 5 responden (16,7%), sedangkan 18 responden (60%) hanya kadang-kadang mengikuti kegiatan kemasyarakatan atau tidak terlalu sering, dan 7 responden (23,3%) menjawab tidak terlibat dalam kegiatan kemasyarakatan di lingkungan sekitar tempat tinggal mereka.

Mereka yang tidak pernah terlibat dalam kegiatan kemasyarakatan pada lingkungan sekitar tempat tinggal mereka karena mereka merasa dirinya bukan sebagai penghuni tetap atau hanya mengontrak saja. Di samping itu jumlah jam kerja mereka melebihi jam kerja normal, sehingga mereka tidak dapat ikut dalam kegiatan kemasyarakatan di lingkungan tempat tinggal mereka.

KESIMPULAN

Latar belakang kehidupan sosial para pedagang pisang epe di pantai losari rata-rata berasal dari suku Makassar. Kebanyakan tingkat pendidikan yang dimiliki pedagang pisang epe hanya sebatas SD dan SMP, sehingga mendorong mereka untuk terjun ke sektor informal. Karena bekerja di sektor informal tidak memerlukan pendidikan dan keterampilan yang tinggi.

Motivasi para pendatang dari asal sebagai pedagang pisang epe sebagai suatu pekerjaan, yaitu adanya dorongan untuk bekerja di kota dan ajakan untuk bekerja sebagai pedagang pisang epe. Peran sanak keluarga dan teman juga tidak lepas membantu mencarikan pekerjaan ketika para pendatang dari desa berada di kota.

Keadaan sosial ekonomi pedagang pisang epe di pantai losari cukup memadai. Sebagai pekerja di sektor informal, keadaan tempat tinggal mereka yang status kepemilikan rumah sendiri yang terbuat dari setengah batu. Kesadaran yang tinggi akan pentingnya kesehatan bagi kelangsungan hidup, hubungan yang baik antar sesama penjual pisang epe walaupun persaingan tetap ada.

Sektor informal pedagang kaki lima khususnya para pedagang pisang epe, tampaknya harus patut diperhitungkan dalam konteks permasalahan tenaga kerja secara umum. Tindakan bijaksana yang patut di lakukan oleh pihak terkait terhadap kaki lima khususnya pedagang pisang epe adalah bukan tindakan mematikan kesempatan kerja mereka tanda mencari alternatif lain untuk tetap memperoleh penghasilan.

Bagi pemerintah daerah tindakan yang dilakukan bukanlah menertibkan dan mengusir seperti yang dilakukan beberapa tahun dan beberapa bulan yang lalu. Tetapi sebaiknya pemerintah mengadakan pembinaan sebagai unit usaha yang bertujuan mengembangkan kegiatan usaha pedagang kaki lima karena mereka adalah kelompok yang memounyai potensi untuk menjadikan usaha formal. Disamping itu pula, pemerintah harus meminimalisir jumlah pedagang kaki lima di pantai losari, karena tiap tahunnya akan semakin bertambah.

Pemerintah Kota Makassar dan pedagang kaki lima khususnya pedagang pisang epe sebaiknya membentuk suatu organisasi yang dapat menampung aspirasi mereka yang bertujuan untuk melindungi dan membantu para pedagang kaki lima dari segala macam hambatan yang dirasakan selama ini. Dalam pembinaan dan pengembagna sektor informal sebaiknya saling mendukung dan berkesinambungan, baik pihak pemerintah yang terkait maupun dari pihak swasta mengingat peranannya dalam mengatasi ketenagakerjaan yang cukup besar.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Syukur, 1986, *Perkembangan dan Perencanaan Studi Implementasi, Pusdiklat Pegawai Negeri*, Jakarta.
- Abdul Wahab, Solichin, 2002, *Analisis Kebijakan : Dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*, Edisi Kedua Cetakan Ketiga, Bumi Aksara, Jakarta.
- Abustam, Muhammad Idrus. 1989. *Gerak penduduk pembangunan dan perubahan sosial*, Jakarta: UI-Press.

- Abu Hamid, 1992, sumbangan sektor informal terhadap struktur perekonomian kotamadya ujungpandang. Makalah Seminar nasional "peranan swasta dalam pengelolaan kota di Indonesia"
- An-nat, B., 1983, Implementasi Kebijakan Penanganan PKL : Studi kasus di Yogyakarta dan DKI - Jakarta. Beberapa koleksi hasil penelitian program Pascasarjana Magister Administrasi Publik, UGM 1995.
- Arikunto, Suharsimin. 2006. Prosedur penelitian Suatu Pendekatan Praktik, Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Bintarto. 1989, Interaksi Desa-Kota dan Permasalahannya. Ghalia Indonesia. Jakarta
- Dahriani, 1995, Potre Pedagang Kaki Lima di Pantai Losari Kotamadya Ujung Pandang, Skripsi (tidak diterbitkan) Universitas Hasanuddin, Makassar
- Effendy, Onong Uchjana. 1994. Ilmu, Teori dan Filsafat Komunikasi. Bandung : PT Citra Aditya Bakti
- Faisal, Sanapiah. 2007. Format-format Penelitian Sosial, Jakarta: PT RajaGrafindo persaja
- Hart, K., 1973, Sektor Informal dan Pengangguran di Kota, Gramedia, Yogyakarta.
- Jayadinata, J.T., 1999, Tata Guna Tanah Dalam Perencanaan Pedesaan, Perkotaan dan Wilayah, ITB, Bandung.
- Keputusan Walikota Makassar Nomor 01 Tahun 2002 tentang memberikan kewenangan kepada Camat untuk melakukan penertiban dan pembinaan pedagang kaki lima
- Khairuddin. 1992. Pembangunan Masyarakat, Yogyakarta: Liberty Yogyakarta.
- Koentjaraningrat, 1981, Kebudayaan Mentalitas dan pembangunan, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta
- Manning, Chris dan Tadjuddin Noer Effendi. 1991. Urbanisasi, Pengangguran, dan Sektor Informal di Kota, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Munir, R. 2000. Migrasi. Dalam Lembaga Demografi FEUI. Dasar-dasar Demografi: edisi 2000. Jakarta: Lembaga Penerbit Universitas Indonesia
- Prasetyo, Bambang dan Lina Miftahul jannah. 2011. Metode Penelitian Kuantitatif: Teori dan Aplikasi, Jakarta: PT. Rajagrifindor Persada
- Perda Kotamadya Tingkat II Ujung Pandang No. 2 Tahun 1990, Tentang Pembinaan Pedagang kaki Lima Dalam Kota Madya Tingkat II Ujung pandang
- Suharto, Edi. 2009. Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat, Bandung: PT Refika Aditama.